

Strategi Pemberdayaan Kawasan Kumuh di Kota Makassar: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Mubarak Dahlan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
mubarakdahlan@unm.ac.id

Abstrak

Artikel ini bermaksud mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kawasan kumuh di kota untuk mendukung misi pembangunan yang berkelanjutan sebagai isu strategis dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus dan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai lapisan masyarakat yang terlibat dalam program ini. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberdayaan kawasan kumuh di kota Makassar, sejauh ini tidak hanya berorientasi pada serangkaian upaya perbaikan fisik seperti pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa rekomendasi penting hubungannya dengan langkah strategis yakni berupa peningkatan partisipasi masyarakat, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM, serta penguatan kapasitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Langkah strategis lainnya yakni pemberdayaan berbasis pada komunitas, dengan menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek, khususnya sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup warga yang bermukim di kawasan kumuh.

Abstract

This article aims to identify and analyze the forms of empowerment strategies implemented by the government in urban slums to support the mission of sustainable development as a strategic global issue. This study uses a qualitative approach with a case study model and conducts in-depth interviews with various levels of society involved in this program. The results of the study found that the empowerment of slum areas in the city of Makassar, so far, is not only oriented towards a series of physical improvements such as infrastructure development, but must also involve social, economic, and environmental aspects. Several important recommendations related to strategic steps include increasing community participation, cooperation between the government, the private sector, and NGOs, and strengthening local capacity in natural resource management. Another strategic step is community-based empowerment, with an emphasis on empowering local communities in every stage of project planning and implementation, particularly as an effort to improve the quality of life of residents living in slum areas.

Kata Kunci

pemberdayaan; kawasan kumuh; strategi; pembangunan berkelanjutan; partisipasi

1. Pendahuluan

Kawasan kumuh (Putro, J. D., 2011) adalah fenomena ekologi perkotaan yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Makassar (Syafri, S, 2021). Masalah lingkungan seperti ini tidak sebatas mempengaruhi dimensi kualitas kawasan, tetapi juga berdampak pada kondisi pemukiman khususnya yang padat penduduknya (Ahmadin, 2025). Hal ini antara lain sering tampak pada masalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar kota, seperti: air bersih, sanitasi, dan kondisi jalan yang layak bagi masyarakat (Gaol, R. L., 2025). Lebih dari itu, kondisi ini juga menjadi penghambat bagi proses pencapaian pembangunan berkelanjutan, seperti: aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Akibu, R. S., 2025). Mengacu pada kondisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa salah satu tantangan mendasar dalam pengelolaan kawasan kumuh adalah jenis langkah strategis dalam mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya perbaikan lingkungan secara menyeluruh (Hanum, Y., 2024).

Pertumbuhan jumlah penduduk di kota Makassar yang demikian cepat, arus urbanisasi yang semakin tinggi, dan keterbatasan lahan, dalam faktanya semakin memperburuk kondisi kawasan kumuh (Naing, N., 2022). Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, sebagian besar penghuni kawasan kumuh, memiliki pendapatan yang relatif rendah dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas publik (Aljurida, A. M., 2022). Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial, yang dapat meningkatkan masalah kemiskinan dan kesehatan, serta memperlebar kesenjangan sosial antarwarga kota (Nurhakim, M. I., 2025).

Kondisi memperhatikan tersebut menyebabkan perlunya serangkaian strategi pemberdayaan kawasan kumuh di Kota Makassar yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Maksudnya, pemberdayaan tidak hanya berhenti pada aspek perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup secara keseluruhan upaya di bidang sosial-ekonomi dan partisipatif (Ariaoktafiani, P., 2024). Dalam kondisi seperti inilah langkah strategi pemberdayaan masyarakat menjadi sangat urgen, antara lain berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat lokal secara lebih luas untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan di lingkungan mereka. Selain itu, demi tercapainya pembangunan kawasan kumuh, maka diperlukan sinergitas yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan pihak terkait lainnya (Romidhoni, M., 2025).

Kontribusi artikel adalah sebuah upaya ilmiah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi pemberdayaan bagi kawasan kumuh di Kota Makassar yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui analisis serta pendekatan yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk pemberdayaan kawasan kumuh di masa mendatang.

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Ahmadin, 2013) baik pada jenis data maupun analisisnya. Desain penelitiannya menggunakan studi kasus (Rahman et al., 2022) untuk menganalisis strategi pemberdayaan kawasan kumuh di Kota Makassar. Pemilihan metode ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali secara mendalam berbagai data dan informasi yang mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan dari berbagai pihak terkait, serta mendeskripsikan fenomena pemberdayaan kawasan kumuh dalam konteks yang lebih luas.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar, yang dipilih berdasarkan kriteria, seperti: tingkat kepadatan penduduk, kondisi infrastruktur, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Kawasan-kawasan yang dipilih memiliki karakteristik yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kumuh di kota ini.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) Wawancara mendalam (In-depth interviews), yakni bertemu muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya (Agusta, I., 2003). Wawancara dilakukan dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan kawasan kumuh, seperti pemerintah daerah, perwakilan LSM, tokoh masyarakat, serta warga yang tinggal di kawasan kumuh. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan kawasan kumuh, serta strategi yang dianggap efektif; (2) Focus Group Discussion (FGD), yakni diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator (Sugarda, Y. B., 2020). Ada tiga komponen utama dalam kegiatan FGD, yakni diskusi (bukan kegiatan wawancara atau obrolan), kelompok (bukan individual), serta terfokus (bukan dilakukan secara bebas). FGD dilakukan dengan kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh untuk memperoleh informasi mengenai perspektif mereka tentang pemberdayaan, permasalahan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap perbaikan kawasan tempat tinggal mereka. FGD ini juga menjadi sarana untuk mendapatkan umpan balik terkait kebijakan yang telah diterapkan di kawasan kumuh; dan (3) Observasi Partisipatif, yakni peneliti terlibat secara intensif dan langsung dalam kegiatan maupun aktivitas masyarakat. Peneliti dalam hal ini aktif berpartisipasi, baik sebagai pengamat maupun sebagai anggota kelompok, untuk mengumpulkan data yang kaya dan terperinci tentang perilaku, interaksi, dan kebiasaan kelompok yang dipelajari (Achjar, 2023). Peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk memetakan kondisi fisik kawasan kumuh dan mencatat dinamika sosial serta aktivitas pemberdayaan yang berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam implementasi strategi pemberdayaan.

2.3 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) Pengkodean (Coding), yakni data hasil wawancara, FGD, dan observasi diberi kode untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pemberdayaan kawasan kumuh, seperti: peran masyarakat, kebijakan pemerintah, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan; (2) Kategorisasi, yakni tema-tema yang ditemukan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas, seperti pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta aspek partisipatif dalam perencanaan pembangunan; dan (3) Interpretasi, yakni hasil analisis tematik kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pemberdayaan kawasan kumuh yang telah diterapkan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.

2.4 Validitas Data

Untuk validasi data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, FGD, dan observasi). Selain itu, proses member checking juga dilakukan dengan meminta umpan balik dari informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana, Konsep, dan Teori

Wacana, konsep, serta teori tentang pemberdayaan kawasan kumuh sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan, sesungguhnya telah banyak dibahas dalam berbagai kajian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tinjauan pustaka ini bermaksud meletakkan beberapa teori dan konsep dasar yang relevan, serta studi-studi sebelumnya yang relevan (Ahmadin et al., 2025) dengan isu pemberdayaan kawasan kumuh, dengan fokus kajian pada lokus yakni Kota Makassar.

3.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berorientasi pada tujuan peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengelola aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Dalam sebuah tulisan karya Narayan (2002) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk memperkuat kontrol masyarakat terhadap sumber daya, yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Fokus pemberdayaan adalah pada aspek perubahan sosial (Zulkarnaen et al., 2022) yang mendalam dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hubungannya dengan kawasan kumuh, pemberdayaan masyarakat berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mendiami kawasan tersebut melalui program peningkatan keterampilan, akses terhadap layanan dasar, serta keterlibatan dalam perencanaan pembangunan (Gaol, R. L., 2025). Dengan demikian, upaya pemberdayaan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses pembebasan berorientasi pada peniadaan sejumlah hambatan struktural bagi masyarakat untuk ikut berkembang (Sen, 1999).

3.1.2 Kawasan Kumuh dan Pembangunan Berkelanjutan

Menyebut kawasan kumuh maka asosiasi pemikiran seseorang langsung mengarah pada kondisi pemukiman yang tidak layak huni serta akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik (Gaol, R. L., 2025). Sebuah kasus di India yang menarik dijadikan perbandingan bahwa permukiman kumuh yang dimaksud adalah mengacu pada hunian padat penduduk dengan harga sewa yang rendah dengan kualitas di bawah standar (Huchzermeyer, 2011). Fenomena ini dianggap tantangan besar untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup (Attariq, 2025). Adapun esensi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Nasution, (2024). Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan di kawasan kumuh berfokus pada upaya melakukan perbaikan pada kondisi fisik, sosial, dan ekonomi kawasan, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan (Ariaoktafiani, P., 2024).

3.1.3 Strategi Pemberdayaan Kawasan Kumuh

Jika membaca berbagai literatur tentang strategi pemberdayaan kawasan kumuh, maka akan ditemukan beragam pendekatan dan strategi yang variatif. Sebuah karya tulis yang dikarang oleh Dovey (2010) mengkampanyekan pentingnya pendekatan berbasis komunitas yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini senada dengan pandangan Chambers (1997), yang mengatakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan karena melibatkan langsung pihak yang paling merasakan dampaknya. Untuk maksud tersebut, maka pemberdayaan ekonomi juga dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pemberdayaan kawasan kumuh (Setiadi, 2023). Strategi pemberdayaannya berupa pengembangan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke pasar, dan pemberdayaan wirausaha dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk kawasan kumuh (Achmad, W., 2024).

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan kumuh secara fungsional dan praktis dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Achmad, W., 2024). Selain itu, aspek penting lainnya adalah pemberdayaan sosial antara lain berupa pembentukan organisasi komunitas yang kuat dan partisipatif dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam forum pembangunan (Padilah, 2023). Sebagai contoh yakni berupa peningkatan kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya untuk kawasan kumuh yang rentan terhadap bencana alam (Gaol, R. L., 2025).

3.1.4 Peran Pemerintah dan Kolaborasi Multi-Pihak

Dimensi penting dari program pemberdayaan kawasan kumuh antara lain adalah kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini sering dikemukakan berupa pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif dan kolaboratif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di kawasan kumuh (Pamungkas, 2024). Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur serta penciptaan berbagai lapangan pekerjaan (Suhardi, S., 2024). Untuk maksud tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan berbasis integrasi sektor yang melibatkan sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sangat dianjurkan dalam perencanaan pemberdayaan kawasan kumuh (Masitha, L., 2024). Pentingnya pemberdayaan berbasis integrasi tersebut sejalan dengan amanah World Bank (2010) yang merekomendasikan agar program pemberdayaan kawasan kumuh dirancang secara terintegrasi, melibatkan berbagai sektor dan pihak terkait untuk memaksimalkan dampaknya.

3.1.5 Studi Terkait Pemberdayaan Kawasan Kumuh di Indonesia

Menelusuri beberapa hasil penelitian tentang pemberdayaan kawasan kumuh di Indonesia, diperoleh informasi bahwa pendekatan berbasis masyarakat terbukti mampu memberi dampak positif terhadap kualitas hidup penduduk di kawasan kumuh. Hasil penelitian yang dilakukan Wibowo (2015) di Jakarta menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan perbaikan infrastruktur di kawasan kumuh dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan proyek tersebut. Sebaliknya, program pemberdayaan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta lebih efektif dalam mengatasi masalah kawasan kumuh secara menyeluruh (Ariaoktafiani, P., 2024). Sebuah tantangan terbesar yang muncul dalam pemberdayaan kawasan kumuh di Indonesia adalah keterbatasan dana pemerintah daerah dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Kenyataan kurang menggembirakan juga datang dari persepsi bahwa kebijakan pemberdayaan kawasan kumuh, implementasinya sering terhambat oleh masalah birokrasi dan kekurangan sumber daya manusia (Ratitya, S.P., 2025).

3.1.6 Konteks Pemberdayaan Kawasan Kumuh di Kota Makassar

Pemberdayaan kawasan kumuh di kota Makassar, seharusnya menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data Bappeda Kota Makassar (2020), menunjukkan bahwa sejumlah kawasan pada ibukota provinsi Sulawesi Selatan ini, seperti wilayah pesisir dan sepanjang sungai, tergolong kawasan kumuh (Praja, S.E, 2025). Menyikapi kondisi tersebut, maka pemerintah Kota Makassar sejauh ini telah meluncurkan beberapa program pemberdayaan kawasan kumuh, seperti antara lain melalui program Makassar Green and Clean. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan (Mirza, M. R., 2024). Meskipun demikian, dalam kenyataannya program pemberdayaan kawasan kumuh di kota Makassar masih dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar, seperti: keterbatasan dana, ketergantungan pada bantuan luar, dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi sejumlah problematika serta menganalisis strategi pemberdayaan kawasan kumuh yang lebih efektif di masa mendatang

3.2 Potret Kawasan Kumuh dan Program Pemberdayaan

3.2.1 Kondisi Kawasan Kumuh di Kota Makassar

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kawasan kumuh di Kota Makassar terdistribusi secara di berbagai lokasi, dengan karakteristik spasial yang saling beda (Alfasya, R., 2023). Kawasan tersebut biasanya terletak di daerah pesisir, sepanjang bantaran sungai, serta di area yang padat penduduk dengan akses terbatas terhadap fasilitas dasar. Di beberapa tempat, seperti di kawasan Bantaran Sungai Tallo, masyarakat tinggal dalam kondisi padat dengan rumah semi-permanen yang tidak memenuhi standar kelayakan huni (Alfasya, R., 2023). Selain itu, akses terhadap air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan juga sangat terbatas.

3.2.2 Strategi Pemberdayaan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi pemberdayaan yang diterapkan di kawasan kumuh Kota Makassar, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, beberapa strategi yang ditemukan meliputi:

a. Pemberdayaan Ekonomi melalui Pengembangan UMKM

Program pemberdayaan ekonomi di kawasan kumuh difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Di kawasan Bantaran Sungai Tallo, Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal untuk memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, dan budidaya ikan (Mirza, M. R., 2024). Tujuan program pemberdayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan peluang kerja (usaha). Program ini terbukti dapat direalisasikan dan untuk beberapa kasus sukses dalam mengurangi tingkat pengangguran di tingkat lokal. Namun di balik itu semua tetap muncul permasalahan utama yakni keterbatasan akses terhadap modal dan pasar yang lebih luas, serta tantangan dalam pemasaran dan distribusi produk UMKM.

b. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan

Sasaran program lainnya yakni pada upaya perbaikan infrastruktur dasar, seperti penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi, dan perbaikan jalan lingkungan (Mirza, M. R., 2024). Hubungannya dengan program pembenahan kualitas lingkungan hidup di kota Makassar yakni pelaksanaan program Makassar Green and Clean, dimana program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan memperbaiki akses terhadap fasilitas publik di kawasan kumuh (Anshar, M., 2020). Sasaran program ini mencakup kegiatan pembangunan saluran drainase, pemasangan fasilitas WC umum, serta penyediaan fasilitas air bersih yang lebih mudah dijangkau. Meskipun demikian, program ini masih menyisakan masalah utama khususnya pada perbaikan infrastruktur berupa masih terbatasnya anggaran dan masalah kepemilikan tanah, yang menjadi kendala bagi pelaksanaan rehabilitasi kawasan kumuh (Nurprasetyarani, S. Z., 2025).

c. Pemberdayaan Sosial dan Keterlibatan Masyarakat

Program lainnya adalah pemberdayaan sosial terhadap kawasan kumuh di kota Makassar. Hasil data penelitian mengenai program ini menemukan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, terutama di kawasan Mariso (Hakim, A., 2024). Adapun program pemberdayaan sosial yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dapat ditemukan seperti pada upaya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), terbukti lebih berhasil (Kholiqi, A, 2020). Masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap proyek yang dilaksanakan, yang mendorong keberlanjutan

proyek tersebut (Hidayat, A. S, 2024). Meski demikian, tantangan yang dihadapi adalah sebagian besar penduduk kawasan kumuh kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka atau bagaimana berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

d. Kolaborasi Multi-Pihak

Strategi pemberdayaan lainnya adalah berupa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang diimplementasikan melalui pemberdayaan kawasan kumuh (Ariakotafiani, P., 2024). Beberapa proyek yang berorientasi pada program kolaborasi dapat dilihat, seperti pada pengembangan kawasan Biring Kanaya, yang melibatkan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar, LSM, dan sektor swasta (Dirawan, G. D., 2024). Sektor swasta dalam hal ini umumnya memberikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur, sementara LSM orientasi programnya berupa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan. Program kolaborasi ini sesungguhnya memberikan manfaat baik, namun dibalik upaya pemberdayaan masih menyisakan sejumlah masalah antara lain berupa koordinasi antara pihak-pihak terkendala oleh adanya perbedaan kepentingan serta birokrasi yang kadang membuat rumit.

3.3 Tantangan dalam Pemberdayaan Kawasan Kumuh

Realisasi pemberdayaan kawasan pemukiman kumuh di kota Makassar, sejauh ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain berupa keterbatasan sumber daya, yakni banyak kawasan kumuh yang perlu diberdayakan, sementara anggaran dan sumber daya yang terbatas menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan (Simarmata, 2021). Selain itu, koordinasi antar-pihak, yakni meskipun ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, koordinasi yang efektif antara berbagai pihak seringkali terhambat. Demikian pula masih kurangnya sinkronisasi dalam program perencanaan dan realisasi program pemberdayaan pada gilirannya menghambat efektivitas dari inisiasi tersebut (Hariadi, M., 2024).

Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting dibahas adalah masalah kepemilikan tanah. Hal ini terbukti bahwa pada sebagian besar kawasan kumuh terletak di lahan yang status hukumnya tidak jelas, apakah itu tanah tersebut milik negara atau milik pribadi (Firdaus, M. A., 2025). Permasalahan ini menghambat upaya rehabilitasi kawasan, alasannya karena pembangunan infrastruktur maupun perbaikan rumah tinggal tidak dapat dilakukan tanpa adanya kepastian status tanah. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah di kalangan penduduk kawasan kumuh menjadi kendala mendasar bagi akses informasi tentang program pemberdayaan, dan bahkan mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan (Tiarawati, F., 2020).

Berangkat dari beberapa fenomena realisasi serta kendala bagi pemberdayaan kawasan kumuh di Kota Makassar, maka dipandang perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pelaksanaan program ini idealnya tidak hanya berorientasi pada upaya perbaikan infrastruktur semata, tetapi lebih jauh menjangkau pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Alasannya karena pendekatan berbasis komunitas yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, dalam banyak contoh kasus realisasi program pemberdayaan terbukti lebih efektif dalam menciptakan perubahan dalam pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, munculnya tantangan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antar-pihak, dan status kepemilikan tanah tetap memerlukan upaya antisipatif agar pemberdayaan dapat berjalan secara optimal. Singkatnya bahwa keberhasilan program pemberdayaan kawasan kumuh, sangat ditentukan oleh kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Untuk maksud tersebut, maka perlu pembangunan kapasitas lokal serta memperkuat peran serta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Harapannya tentu guna mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan kumuh Kota Makassar.

4. Kesimpulan

Car Pelaksanaan program pemberdayaan kawasan kumuh di Kota Makassar dalam kenyataannya dihadapkan pada tantangan fundamental khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan kumuh di Makassar tersebar di berbagai lokasi, dengan kondisi fisik dan sosial yang sangat memprihatinkan. Indikator tersebut antara lain terlihat pada akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kualitas hidup penduduk yang tinggal di kawasan tersebut rendah. Berangkat dari realitas tersebut, maka pemberdayaan kawasan kumuh idelanya tidak hanya berfokus pada pembenahan aspek fisik infrastruktur saja, tetapi juga memerlukan pendekatan meliputi pemberdayaan pada aspek sosial, ekonomi, dan partisipatif masyarakat. Beberapa strategi yang telah diimplementasikan berupa pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, memberikan pengaruh positif bagi masyarakat yang bermukim di kawasan kumuh. Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh realisasi program pemberdayaan ini yakni keterbatasan dana, masalah kepemilikan tanah, serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Akhirnya, dapat dipahami bahwa sesungguhnya keberhasilan pemberdayaan kawasan kumuh sangat tergantung pada kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya.

Daftar Pustaka

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Achmad, W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(9).
- Ahmadin, A. (2013). Metode Penelitian Sosial. Rayhan Intermedia.
- Ahmadin, A. (2025). SosiologiRuang: Konsep, Teori, dan Studi Kasus. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Ahmadin, A., Sanur, I. S., & Nur, R. J. (2025). Review of public space studies in Indonesia: Research identification and future social agenda. *Journal of Water and Land Development*, 136–147.
- Akibu, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo Integrasi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan. *Perubahan Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 107.
- Alfasya, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Tallo Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Aljurida, A. M. (2022). Model Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Makassar= Implementation of policy utulization of housing and settlement areas in makassar city (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Anshar, M. (2020). TEPAT Jurnal Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020. TEPAT Jurnal Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat| Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020.
- Ariaoktafiani, P. (2024). Strategi Berkelanjutan untuk Transformasi Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir Tanjungmas Semarang. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 9(5), 456-467.
- Ariaoktafiani, P. (2024). Strategi Berkelanjutan untuk Transformasi Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir Tanjungmas Semarang. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 9(5), 456-467.
- Attariq, F., Erviantono, T., & Pramana, G. I. (2025). Membangun Keberlanjutan Kota: Penanganan Kemiskinan Perbaikan Permukiman dan Mitigasi Urban Heat Island. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 11-11.

- Dirawan, G. D. (2024). MENGUKUR INDIKATOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU KOTA BERKELANJUTAN.
- Firdaus, M. A., Indrawan, R., Hafidah, N., & Ristiawati, R. (2025, May). Pendekatan Berbasis Lingkungan Untuk Pencegahan Permukiman Kumuh Di Kawasan Lahan Basah Kota Banjarmasin. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 10, No. 1).
- Gaol, R. L. (2025). Pendekatan Strategis dalam Mengatasi Permasalahan Perumahan Kumuh di Kabupaten Muna. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1185-1197.
- HAKIM, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kotaku Dalam Menangani Masalah Permukiman Kumuh Di Kelurahan Ratusima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hanum, Y., & Endah, K. (2024). Pengelolaan Masalah Lingkungan Berbasis Social Empowerment Oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. *Jurnal Otonomi*, 1(1), 49-58.
- Hidayat, A. S., & Sa'adah, M. A. (2024). PERsepsi Ekonomi Islam Masyarakat Terhadap Rencana Pengambilan Kebijakan Proyek Krl Sidoarjo-Surabaya. *An Nawawi*, 4(2), 147-156.
- Kann, O., Huchzermeyer, C., Kovács, R., Wirtz, S., & Schuelke, M. (2011). Gamma oscillations in the hippocampus require high complex I gene expression and strong functional performance of mitochondria. *Brain*, 134(2), 345-358.
- Kholqi, A., & Alfirdaus, L. K. (2020). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 141-150.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Masitha, L. (2024). Implementasi Revitalisasi Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciptomulyo Malang Berbasis Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs): Implementation of Slum Area Revitalization in Kelurahan Ciptomulyo, Malang Based on Sustainable Development Goals (SDGs) Principles. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(2), 35-47.
- Mirza, M. R. (2024). Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Naing, N. (2022). Model Pengelolaan Pemukiman Kumuh di Sulawesi Selatan: Jariah Publishing. Jariah Publishing Intermedia.
- Narayan-Parker, D. (Ed.). (2002). Empowerment and poverty reduction: A sourcebook. World Bank Publications.
- Nasution, A. M., Ulfa, N., & Harahap, N. (2024). Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 208-216.
- Nurhakim, M. I. (2025). Memahami Kompleksitas Kemiskinan di Perkotaan dari Kebijakan Publik dalam Perspektif Sosial. *Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Strategis*, 1(1 Juli), 37-48.
- Nurprasetyarani, S. Z., & Suwitri, S. (2025). Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 456-475.
- Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi politik dalam pembangunan desa di kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues*, 192-201.
- Pamungkas, A. F., Nugroho, W. H., & Yudiana, B. (2024). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Pekalongan melalui Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 20(2), 81-96.
- Praja, S. E., & Asran, A. (2025). Strategi Tata Ruang Kota Ramah Lingkungan: Pendekatan Ekologis dalam Perencanaan Urban Kota Makassar. *Journal of Health Quality Development*, 5(1), 12-22.
- Putro, J. D. (2011). Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1).
- Rahman, A., Wirastika Sari, N. M., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Ode Amame, A. P., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). Metode Penelitian Ilmu Sosial. In *Metode Pengumpulan Data (Klasifikasi, Metode Dan Etika)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

- Ratitya, S. P., Prabawati, N. P. A., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam Mendukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung. *Socio-political Communication and Policy Review*.
- Romidhoni, M. (2025). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 9(1), 78-101.
- Setiadi, M. T., Rahayu, B., Utari, T., ZA, S. Z., & Yunita, E. A. (2023). Pemberdayaan wirausaha wanita di permukiman kumuh urban: Pendekatan penelitian aksi. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 01-Nov.
- Sugarda, Y. B. (2020). Panduan praktis pelaksanaan focus group discussion sebagai metode riset kualitatif. Gramedia Pustaka Utama.
- Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 42-55.
- Syafri, S., & Rahman, R. (2021). Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(2), 105-113.
- Tiarawati, F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Daerah Kumuh (Studi Tentang Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Di Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Wibowo, D. H., & Zainul Arifin, S. (2015). Analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1).
- Zulkarnaen, T. A., Dahlan, M., & Ahmadin, M. (2022). Konstruksi Sosial, Budaya dan Ekonomi pada Pola Makan Masyarakat Kelurahan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 6(2), 97–104.